

Welfare Governance Berbasis Data dan Penurunan Kerentanan Keluarga: Perbandingan Jawa Barat dan Jawa Timur dalam Integrasi Stunting, Kemiskinan, dan Registri Sosial

Yulia Maheswari ¹

Pusat Studi Perlindungan Sosial dan Ekonomi Regional, Indonesia

Korespondensi Email : yulia.maheswari@researchmail.id

Abstract :

This article investigates how data-based welfare governance shapes subnational capacity to address poverty and child stunting by comparing West Java and East Java. Both provinces have large poor populations and high policy salience in Indonesia's welfare agenda, yet they differ in institutional integration and policy emphasis. Using comparative qualitative analysis of official poverty statistics, stunting prevalence data, and government documents on Regsosek and DTSEN from 2024–2026, the article argues that welfare outcomes depend less on program abundance than on data integration and coordination quality. West Java shows stronger public communication and program integration linking poverty, food security, and stunting prevention, while East Java demonstrates relatively better stunting performance but still faces large poverty burdens. The study finds that the transition from fragmented registries toward an integrated social and economic database potentially reduces exclusion and overlap, but only if subnational governments possess the organizational capacity to use the data for planning, budgeting, and targeting. The article contributes to applied business and economic research by linking welfare data governance to public expenditure efficiency and long-term human capital formation. It proposes a model in which integrated registry capacity improves targeting quality, which strengthens coordinated interventions and ultimately reduces welfare vulnerability.

Keywords : Welfare Governance, Social Registry, Stunting, Poverty, Targeting Efficiency.

Abstrak :

Artikel ini menyelidiki bagaimana tata kelola kesejahteraan berbasis data membentuk kapasitas daerah dalam menangani kemiskinan dan stunting anak melalui perbandingan Jawa Barat dan Jawa Timur. Kedua provinsi memiliki jumlah penduduk miskin yang besar dan menjadi wilayah strategis dalam agenda kesejahteraan Indonesia, tetapi keduanya berbeda dalam integrasi kelembagaan dan penekanan kebijakan. Dengan menggunakan analisis kualitatif komparatif atas statistik resmi kemiskinan, data prevalensi stunting, serta dokumen pemerintah tentang Regsosek dan DTSEN periode 2024–2026, artikel ini berargumen bahwa outcome kesejahteraan lebih ditentukan oleh integrasi data dan kualitas koordinasi daripada banyaknya program. Jawa Barat memperlihatkan komunikasi kebijakan yang lebih kuat dalam mengaitkan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pencegahan stunting, sedangkan Jawa Timur menunjukkan

performa stunting yang relatif lebih baik namun masih menanggung beban kemiskinan yang besar. Studi ini menemukan bahwa transisi dari registri terfragmentasi menuju basis data sosial-ekonomi terintegrasi berpotensi mengurangi exclusion dan overlap, tetapi hanya efektif jika pemerintah daerah memiliki kapasitas organisasi untuk menggunakannya dalam perencanaan, penganggaran, dan penargetan.

Kata kunci: *Tata Kelola Kesejahteraan, Registri Sosial, Stunting, Kemiskinan, Efisiensi Penargetan.*

Pendahuluan

Dalam *welfare governance*, kualitas data adalah fondasi dari efisiensi belanja sosial. Program yang besar dapat gagal bila sasaran tidak akurat, data lambat diperbarui, atau antarsektor menggunakan basis data yang berbeda. Literatur kebijakan sosial menekankan bahwa integrasi registri sosial penting untuk mengurangi exclusion error, duplication, dan ketidaksinkronan antarlembaga (Leite et al., 2017; Barca & Hebbar, 2020). Namun, tata kelola registri sosial bukan semata persoalan teknis. Ia adalah persoalan institusional karena menyangkut siapa yang mengumpulkan data, siapa yang memutakhirkan, siapa yang menggunakan, dan bagaimana data diterjemahkan ke keputusan anggaran.

Dalam konteks Indonesia, isu ini menjadi strategis karena kemiskinan, stunting, dan kerentanan rumah tangga saling berkaitan. BPS mencatat pada Maret 2025 Jawa Barat memiliki 3,65 juta penduduk miskin atau 7,02 persen, sedangkan Jawa Timur memiliki 3,876 juta penduduk miskin atau 9,50 persen. Pada sisi lain, SSGI 2024 menunjukkan Jawa Barat masih memiliki jumlah balita stunting sangat besar, sekitar 638 ribu anak, sementara Jawa Timur sekitar 430.780 anak. Meski prevalensi stunting Jawa Timur relatif lebih rendah, beban absolut keduanya tetap besar karena skala populasi yang tinggi (BPS Jawa Barat, 2025; BPS Jawa Timur, 2025; Kemenkes, 2025).

Pemerintah Indonesia merespons persoalan ini dengan mengembangkan Regsosek dan kemudian DTSEN. Bappenas dan UNICEF mencatat bahwa Regsosek mencakup hampir 271 juta jiwa, sekitar 95 persen populasi Indonesia, dan dirancang untuk memperbaiki akurasi perencanaan, penganggaran, serta distribusi perlindungan sosial. DTSEN kemudian ditegaskan sebagai basis data tunggal sosial-ekonomi nasional yang mendukung perencanaan, evaluasi, sinkronisasi lintas sektor, dan optimalisasi penyaluran bantuan (Bappenas & UNICEF, 2024; DTSEN, 2026).

Literatur yang ada menunjukkan bahwa integrasi data sosial dapat meningkatkan kualitas targeting, tetapi temuan empiris masih beragam. Sebagian studi menekankan bahwa registri sosial efektif ketika terhubung dengan sistem pelayanan lokal. Studi lain memperingatkan bahwa integrasi data tanpa kapasitas birokrasi justru menciptakan bottleneck baru karena pemerintah daerah tidak memiliki sumber daya untuk memutakhirkan dan memanfaatkan data secara konsisten. Selain itu, banyak studi melihat registri sosial secara nasional, bukan melalui perbandingan implementasi subnasional yang berbeda.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam artikel ini terletak pada masih terbatasnya studi komparatif antarprovinsi yang menganalisis peran kapasitas *data governance* dalam memediasi hubungan antara program kesejahteraan dan capaian pembangunan manusia. Literatur yang ada cenderung memisahkan isu stunting sebagai persoalan kesehatan semata, padahal dalam perspektif ekonomi, stunting berkaitan erat dengan kondisi sosial-ekonomi rumah tangga, kualitas modal manusia, serta produktivitas jangka panjang. Dalam kerangka *Applied Business and Economic Research*, keterkaitan antara stunting, kemiskinan, dan efisiensi belanja publik menjadi isu strategis karena berimplikasi langsung pada daya saing dan kinerja ekonomi wilayah.

Artikel ini berargumen bahwa integrasi registri sosial berpotensi meningkatkan efektivitas *welfare governance*, namun hanya akan optimal apabila didukung oleh koordinasi lintas-sektor yang kuat serta kapasitas pemerintah daerah dalam menerjemahkan data menjadi intervensi kebijakan yang terintegrasi. Dengan demikian, kualitas *data governance* tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan data, tetapi juga oleh kemampuan institusional dalam mengelola, mengintegrasikan, dan memanfaatkan data secara operasional. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggabungan analisis stunting, kemiskinan, dan registri sosial dalam satu kerangka tata kelola kesejahteraan yang terpadu, sehingga memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami hubungan antara kebijakan sosial dan outcome pembangunan manusia. Adapun tujuan pembuatan artikel ini adalah untuk (1) membandingkan profil kerentanan sosial-ekonomi Jawa Barat dan Jawa Timur; (2) menganalisis bagaimana integrasi data dan koordinasi kebijakan memengaruhi outcome; dan (3) merumuskan model konseptual *welfare governance* berbasis data.

Metode

Penelitian ini menggunakan studi kasus komparatif terhadap Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Kedua kasus dipilih karena memiliki jumlah penduduk miskin dan beban stunting tertinggi secara absolut, tetapi menampilkan konteks kelembagaan dan penekanan kebijakan yang berbeda. Unit analisis adalah tata kelola kesejahteraan daerah, khususnya integrasi registri sosial dengan kebijakan pengentasan kerentanan keluarga.

Data berasal dari BPS Jawa Barat dan Jawa Timur, rilis SSGI 2024 Kementerian Kesehatan, dokumen Regsosek dan DTSEN, serta pernyataan kebijakan resmi pemerintah daerah. Analisis menggunakan teknik *comparative explanatory analysis* dengan fokus pada tiga variabel: kualitas basis data, koordinasi lintas sektor, dan konsistensi penerjemahan data ke intervensi.

Validasi dilakukan melalui triangulasi antar-sumber statistik kemiskinan, data stunting, dan dokumen kebijakan nasional-subnasional.

Hasil dan Diskusi

1. Profil Kerentanan: Jumlah Besar, Karakter Berbeda

Analisis komparatif antara Jawa Barat dan Jawa Timur menunjukkan bahwa kerentanan sosial-ekonomi tidak dapat dipahami hanya melalui indikator persentase, melainkan harus dilihat secara simultan dengan ukuran absolut populasi. Data Badan Pusat Statistik (2025) menunjukkan bahwa Jawa Barat memiliki tingkat kemiskinan 7,02% dengan sekitar 3,65 juta penduduk miskin, sementara Jawa Timur memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi yaitu 9,50% dengan sekitar 3,876 juta penduduk miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa Jawa Barat menghadapi tantangan *scale of targeting* yang besar akibat jumlah penduduknya, sedangkan Jawa Timur menghadapi tekanan distribusi kesejahteraan yang lebih berat karena proporsi kemiskinan yang lebih tinggi. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, kondisi ini menegaskan pentingnya pendekatan kebijakan yang tidak hanya berbasis rasio, tetapi juga mempertimbangkan beban absolut dalam perencanaan intervensi (Ravallion, 2016).

Pada isu stunting, dinamika serupa juga terlihat. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2025) menunjukkan bahwa *prevalensi stunting* di Jawa Timur ($\pm 14,7\%$) lebih rendah dibandingkan Jawa Barat ($\pm 15,9\%$). Namun, karena populasi Jawa Barat jauh lebih besar, jumlah absolut balita stunting justru lebih tinggi. Hal ini menggarisbawahi bahwa indikator prevalensi sering kali tidak cukup untuk menggambarkan beban kebijakan secara komprehensif. Studi dalam bidang ekonomi kesehatan menekankan bahwa alokasi sumber daya publik harus mempertimbangkan kombinasi antara prevalensi dan jumlah kasus absolut untuk mencapai efisiensi dan keadilan distribusi (Victoria et al., 2021).

Lebih jauh, perbedaan konfigurasi ini berdampak langsung pada strategi *targeting* program kesejahteraan. Jawa Barat membutuhkan sistem yang mampu menjangkau populasi besar dengan akurasi tinggi, sementara Jawa Timur membutuhkan intervensi yang lebih intensif untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Dalam konteks ini, kualitas data dan kapasitas *digital governance* menjadi faktor krusial. Laporan World Bank (2022) menegaskan bahwa efektivitas program perlindungan sosial sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mengidentifikasi rumah tangga rentan secara tepat waktu dan akurat. Kesalahan *inclusion* dan *exclusion* dalam *targeting* dapat mengurangi dampak kebijakan secara signifikan, terutama pada wilayah dengan populasi besar dan heterogen seperti Jawa Barat dan Jawa Timur.

Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya pada besaran kemiskinan atau stunting, tetapi pada kemampuan sistem kebijakan dalam merespons kompleksitas tersebut. Pendekatan *applied economic research* menekankan pentingnya integrasi data, kecepatan respons kebijakan, dan ketepatan sasaran dalam meningkatkan efektivitas intervensi. Oleh karena itu, baik Jawa Barat maupun Jawa Timur memerlukan penguatan sistem registri sosial terpadu, interoperabilitas data lintas sektor, serta mekanisme evaluasi berbasis bukti agar alokasi sumber daya dapat lebih adaptif dan tepat sasaran. Strategi ini menjadi kunci untuk menurunkan kerentanan secara berkelanjutan, terutama dalam konteks tekanan demografis dan ketimpangan regional yang terus berkembang.

2. Registri Sosial sebagai Infrastruktur Koordinasi

Transformasi kebijakan berbasis data di Indonesia melalui Regsosek dan DTSEN menandai pergeseran penting dalam tata kelola pembangunan, dari sekadar administrasi menuju data *driven governance*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama UNICEF (2024) menegaskan bahwa Regsosek dirancang untuk meningkatkan akurasi perencanaan, penganggaran, dan pelayanan bagi kelompok rentan melalui pemutakhiran data sosial ekonomi secara menyeluruh. Sementara itu, DTSEN diposisikan sebagai basis data tunggal terintegrasi yang mendukung sinkronisasi lintas sektor dan evaluasi kebijakan (DTSEN, 2026). Dalam perspektif kelembagaan, perkembangan ini menunjukkan bahwa data telah berevolusi menjadi *infrastructure of coordination*, yaitu fondasi yang memungkinkan integrasi kebijakan lintas sektor secara lebih sistematis. Literatur digital governance juga menegaskan bahwa interoperabilitas data merupakan prasyarat utama bagi efektivitas kebijakan publik, terutama dalam konteks penanganan kemiskinan dan kerentanan (Janssen & Kuk, 2016).

Dalam konteks implementasi daerah, Jawa Barat menunjukkan pendekatan kebijakan yang relatif lebih integratif dengan mengaitkan isu stunting, kemiskinan, dan ketahanan pangan dalam satu kerangka intervensi. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa stunting bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga berkaitan erat dengan akses pangan, pendapatan rumah tangga, dan kondisi lingkungan. Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2025) menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Jawa Barat masih berada di kisaran 15,9%, yang menuntut intervensi lintas sektor secara simultan. Pendekatan integratif ini sejalan dengan rekomendasi global yang menekankan pentingnya *multi-sectoral approach* dalam penanganan malnutrisi (Victora et al., 2021), di mana intervensi kesehatan harus diiringi dengan kebijakan perlindungan sosial dan ketahanan pangan.

Sebaliknya, Jawa Timur menunjukkan capaian yang relatif lebih baik dalam penurunan stunting, dengan prevalensi sekitar 14,7%, yang mengindikasikan efektivitas program kesehatan ibu dan anak serta intervensi berbasis keluarga. Namun, tingginya jumlah penduduk miskin di provinsi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keberhasilan sektor kesehatan dan tantangan di sektor ekonomi. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan sektoral tidak otomatis menghasilkan dampak kesejahteraan yang luas tanpa adanya integrasi kebijakan. Studi World Bank (2022) menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan sosial sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor, terutama dalam menghubungkan program kesehatan, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi rumah tangga. Dengan demikian, Jawa Timur menghadapi tantangan dalam memperkuat konektivitas kebijakan agar capaian kesehatan dapat diterjemahkan menjadi penurunan kemiskinan yang lebih signifikan.

Temuan ini menegaskan bahwa keberadaan basis data tunggal seperti Regsosek dan DTSEN hanya akan efektif ketika digunakan sebagai rujukan bersama oleh seluruh perangkat daerah (SKPD). Tanpa integrasi tersebut, program kesehatan, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi akan tetap berjalan dalam *policy silos* yang mengurangi

efektivitas intervensi. Oleh karena itu, kunci keberhasilan bukan hanya pada kualitas data, tetapi pada governance of data yaitu bagaimana data digunakan, dibagikan, dan diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini menuntut penguatan interoperabilitas sistem, standardisasi indikator, serta mekanisme koordinasi lintas sektor yang kuat, sehingga data benar-benar berfungsi sebagai penggerak utama kebijakan yang adaptif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

3. Dari Data ke Outcome: Mengapa Hasil Bisa Berbeda?

Perbedaan kinerja kesejahteraan antara Jawa Barat dan Jawa Timur dapat dijelaskan melalui tiga mekanisme utama, yaitu kapasitas membaca data, koordinasi lintas sektor, dan kemampuan menerjemahkan data ke dalam penganggaran. Dalam kerangka evidence-based policy, pemerintah daerah yang mampu mengklasifikasikan kerentanan rumah tangga secara granular misalnya berdasarkan tingkat kemiskinan, akses pangan, dan risiko kesehatan akan lebih efektif dalam merancang intervensi yang tepat sasaran. Data Badan Pusat Statistik (2025) menunjukkan bahwa Jawa Barat memiliki tingkat kemiskinan 7,02% ($\pm 3,65$ juta jiwa), sedangkan Jawa Timur 9,50% ($\pm 3,876$ juta jiwa), yang menandakan bahwa kedua provinsi menghadapi beban targeting yang besar, meskipun intensitas relatif lebih berat di Jawa Timur. Literatur ekonomi pembangunan menegaskan bahwa akurasi data rumah tangga merupakan determinan utama efektivitas program sosial, karena kesalahan targeting dapat menurunkan dampak kebijakan secara signifikan (Ravallion, 2016).

Mekanisme kedua adalah kapasitas koordinasi lintas sektor, yang menjadi faktor penentu dalam mengintegrasikan berbagai program kesejahteraan seperti kesehatan, bantuan sosial, dan ketahanan pangan. Pada indikator stunting, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2025) mencatat bahwa Jawa Timur memiliki prevalensi lebih rendah ($\pm 14,7\%$) dibanding Jawa Barat ($\pm 15,9\%$). Namun, secara absolut Jawa Barat memiliki sekitar 638 ribu balita stunting, lebih tinggi dibanding Jawa Timur sekitar 430.780 balita. Hal ini menunjukkan bahwa indikator persentase tidak cukup untuk menggambarkan beban kebijakan secara menyeluruh. Studi dalam *The Lancet* menegaskan bahwa penanganan stunting memerlukan pendekatan multisektoral yang mengintegrasikan intervensi kesehatan, gizi, sanitasi, dan perlindungan sosial (Victora et al., 2021). Dengan demikian, keberhasilan Jawa Timur dalam indikator kesehatan perlu dilengkapi dengan penguatan koordinasi lintas sektor agar berdampak pada penurunan kemiskinan secara lebih luas.

Mekanisme ketiga adalah kemampuan menerjemahkan data ke dalam penganggaran (translation capacity), yang menjadi jembatan antara informasi dan aksi kebijakan. Inisiatif seperti Regsosek yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup hampir 271 juta penduduk Indonesia, sementara DTSEN diarahkan sebagai basis data tunggal terintegrasi lintas sektor (Bappenas & UNICEF, 2024; DTSEN, 2026). Transformasi ini menunjukkan bahwa data telah bergeser menjadi infrastruktur koordinasi kebijakan. Namun, studi World Bank (2022) menekankan bahwa keberadaan data saja tidak cukup; dampak kebijakan sangat ditentukan oleh sejauh mana data tersebut digunakan dalam proses perencanaan dan

penganggaran lintas program. Tanpa integrasi ini, program kesejahteraan cenderung berjalan dalam silo yang mengurangi efisiensi belanja sosial.

Secara komparatif, Jawa Barat menunjukkan keunggulan dalam *policy framing* yang lebih integratif, terutama dalam mengaitkan isu kemiskinan, ketahanan pangan, dan stunting dalam satu kerangka kebijakan. Sementara itu, Jawa Timur menunjukkan capaian yang relatif baik pada indikator kesehatan, khususnya penurunan stunting. Namun, kedua provinsi masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan efisiensi belanja sosial ketika data belum sepenuhnya menjadi dasar keputusan lintas sektor. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas *welfare governance* tidak ditentukan oleh banyaknya program, melainkan oleh kualitas integrasi data, koordinasi implementasi, dan kemampuan menerjemahkan data menjadi kebijakan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, penguatan interoperabilitas data, standardisasi indikator, serta mekanisme koordinasi lintas SKPD menjadi kunci untuk meningkatkan dampak kebijakan kesejahteraan secara berkelanjutan.

4. Model Konseptual

Model konseptual penelitian ini menggambarkan hubungan kausal berjenjang yang menempatkan kapasitas registri terintegrasi (*integrated registry capacity*) sebagai fondasi utama dalam tata kelola kesejahteraan. Kapasitas ini mencerminkan kemampuan sistem dalam menghimpun, memutakhirkan, dan mengintegrasikan data rumah tangga secara akurat dan komprehensif. Ketika kapasitas ini kuat, maka kualitas penargetan (*targeting quality*) akan meningkat, sehingga pemerintah dapat mengidentifikasi kelompok rentan secara lebih tepat. Penargetan yang akurat selanjutnya menjadi dasar bagi efektivitas koordinasi lintas sektor (*cross-sector coordination*), karena setiap instansi memiliki rujukan data yang sama dalam merancang intervensi.

Koordinasi lintas sektor yang efektif memungkinkan sinkronisasi program antarbidang, seperti kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi, sehingga mengurangi tumpang tindih dan meningkatkan efisiensi intervensi. Dalam kondisi ini, efektivitas intervensi kesejahteraan (*welfare intervention effectiveness*) akan meningkat karena program yang dijalankan lebih tepat sasaran, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan rumah tangga. Dampak akhirnya adalah penurunan kerentanan rumah tangga (*reduced household vulnerability*), baik dari sisi ekonomi, kesehatan, maupun ketahanan sosial.

Namun demikian, model ini menegaskan bahwa ketersediaan data terintegrasi tidak secara otomatis menghasilkan dampak kebijakan yang signifikan. Data hanya menjadi bernilai ketika dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan lintas sektor, termasuk dalam perencanaan dan penganggaran berbasis risiko. Tanpa pemanfaatan yang optimal, data berpotensi hanya menjadi arsip administratif yang tidak mampu mendorong perubahan substantif dalam kebijakan.

Dengan demikian, efektivitas *welfare governance* sangat ditentukan oleh kapasitas institusional dalam mentransformasikan data menjadi kebijakan yang terarah, terkoordinasi, dan adaptif. Hal ini mencakup kemampuan membangun interoperabilitas

sistem, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta memastikan bahwa setiap intervensi didasarkan pada bukti yang relevan dan terkini. Model ini memberikan kerangka analitis bahwa keberhasilan kebijakan kesejahteraan tidak hanya bergantung pada kualitas data, tetapi juga pada bagaimana data tersebut diolah dan digunakan dalam keseluruhan proses tata kelola.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kerentanan sosial-ekonomi di Jawa Barat dan Jawa Timur memiliki karakter yang berbeda meskipun sama-sama berada dalam skala populasi besar. Jawa Barat menghadapi tantangan utama pada besarnya jumlah absolut penduduk rentan, sementara Jawa Timur menghadapi tekanan lebih tinggi dari sisi proporsi kemiskinan. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan kesejahteraan tidak dapat hanya berbasis indikator persentase, tetapi harus mempertimbangkan beban absolut agar intervensi lebih tepat sasaran. Selain itu, transformasi menuju data-driven governance melalui Regsosek dan DTSEN menempatkan data sebagai infrastruktur koordinasi lintas sektor. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada sejauh mana data tersebut dimanfaatkan dalam perencanaan dan penganggaran; tanpa itu, program kesejahteraan berisiko berjalan secara terpisah dan kurang efisien.

Lebih lanjut, perbedaan kinerja antar daerah dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kapasitas membaca data, koordinasi lintas sektor, dan kemampuan menerjemahkan data ke dalam kebijakan. Jawa Barat relatif unggul dalam pendekatan kebijakan yang integratif, sementara Jawa Timur menunjukkan capaian yang lebih baik pada sektor kesehatan, meskipun keduanya masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi belanja sosial. Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas welfare governance bersifat berjenjang dimulai dari kapasitas registri terintegrasi, peningkatan kualitas penargetan, penguatan koordinasi, hingga efektivitas intervensi yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan kerentanan rumah tangga. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan tidak ditentukan oleh banyaknya program, melainkan oleh kemampuan institusional dalam mengintegrasikan data menjadi kebijakan yang adaptif, terkoordinasi, dan berbasis bukti.

Temuan utama menunjukkan bahwa kerentanan tidak cukup diukur dengan persentase, tetapi harus mempertimbangkan jumlah absolut, sehingga strategi kebijakan perlu kontekstual. Registri sosial terintegrasi berperan sebagai infrastruktur koordinasi, sementara efektivitas *welfare governance* ditentukan oleh kapasitas membaca data, koordinasi lintas sektor, dan kemampuan menerjemahkan data ke dalam kebijakan. Secara keseluruhan, dampak kebijakan tidak ditentukan oleh banyaknya program, melainkan oleh kualitas integrasi data dan koordinasi implementasi.

Referensi

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional., & UNICEF. (2024). *Pemanfaatan Regsosek untuk Perencanaan dan Perlindungan Sosial*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Profil Kemiskinan di Jawa Barat dan Jawa Timur 2025*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Profil Kemiskinan Jawa Barat dan Jawa Timur 2025*. Jakarta.

- Bappenas, & UNICEF. (2024). *Integrated socio-economic registration system for Indonesia: A design report*.
- Barca, V., & Hebbbar, M. (2020). *On-demand and up-to-date? International Policy Centre for Inclusive Growth Working Paper*.
- BPS Jawa Barat. (2025). *Persentase penduduk miskin di Jawa Barat Maret 2025*.
- BPS Jawa Timur. (2025). *Persentase penduduk miskin Jawa Timur Maret 2025*.
- DTSEN. (2026). *Dokumen Pengembangan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional*. Jakarta.
- Janssen, M., & Kuk, G. (2016). *The challenges and limits of big data algorithms in technocratic governance*. *Government Information Quarterly*, 33(3), 371–377. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.08.011>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). *Laporan Status Gizi Indonesia 2025*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Leite, P., George, T., Sun, C., Jones, T., & Lindert, K. (2017). *Social registries for social assistance and beyond*. World Bank.
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
- OECD. (2024). *Public governance for inclusive welfare systems*. OECD Publishing.
- Pemprov Jawa Barat. (2025). *Prevalensi stunting di Jawa Barat turun jadi 15,9 persen pada 2024*.
- Ravallion, M. (2016). *The Economics of Poverty: History, Measurement, and Policy*. Oxford: Oxford University Press.
- Torfin, J., Sørensen, E., & Røiseland, A. (2021). *Collaborative responses to wicked problems*. *Public Management Review*, 23(11), 1598–1619.
- Victora, C. G., Christian, P., Vidaletti, L. P., Gatica-Domínguez, G., Menon, P., & Black, R. E. (2021). *Revisiting maternal and child undernutrition in low-income and middle-income countries*. *The Lancet*, 397(10282), 1388–1399. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)00324-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00324-9)
- World Bank. (2022). *Social Protection and Jobs Responses to COVID-19: A Real-Time Review*. Washington, DC: World Bank.
- (2024). *Adaptive social protection and data systems*. World Bank.